

## **BAB IV**

### **PROFIL INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) DAN SEJARAH INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) DI INDONESIA**

#### **4.1 Profil Internasional Monetary Fund (IMF)**

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) didirikan pada bulan Desember 1945 ketika 29 negara pendirinya (kini anggotanya terdiri dari 188 negara) menandatangani Articles of Agreement yang menjadi anggaran dasarnya. Badan ini mulai beroperasi pada 1 Maret 1947. Otorisasi pendirian IMF sesungguhnya telah disepakati pada waktu dilangsungkannya konferensi Bretton Woods bulan Juli tahun 1944.<sup>28</sup>

Pertanyaan besar selama konferensi Bretton Woods, dalam kaitannya dengan salah satu lembaga yang akan dibentuk yakni IMF, adalah persoalan akses terhadap likuiditas internasional dan apakah sumbernya akan berbentuk bank sentral dunia yang dapat menciptakan dana cadangan baru atau mekanisme peminjaman yang lebih terbatas.

Sekalipun dihadiri banyak negara, pembicaraan selama konferensi didominasi dua rencana yang berlawanan dari Amerika Serikat dan Inggris. Sebagai ketua dewan pakar ekonomi internasional pada Departemen Keuangan AS (US Treasury) antara tahun 1942-1944, Harry Dexter White membuat cetak biru AS bagi akses internasional atas likuiditas, yang bersaing dengan rencana yang telah digariskan Inggris oleh John Maynard Keynes. Secara keseluruhan, rencana White cenderung pada adanya insentif yang didesain untuk menciptakan stabilitas harga dalam perekonomian dunia, sementara Keynes menghendaki suatu sistem yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>28</sup> Dr. HATA, 'Internasional Moneytory Fund (IMF)', in *HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL*, ed. by Nur Saadah Dino Sanggrha Irnanda, 1st edn (Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2016), p. 216.

Pada saat itu jurang pemisah antara White dan Keynes begitu besar. Menggambarkan kesulitan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat diterima semua bangsa, dalam pidatonya pada penutupan sidang pleno konferensi Bretton Woods, Keynes menyatakan:

We delegates of this conference, Mr. President, have been trying to accomplish something very difficult to accomplish. It has been our task to find a common measure, a common standard, a common rule acceptable to each and not irksome to any.

Proposal Keynes bermaksud menciptakan mata uang cadangan (yang menurutnya akan disebut bancor) dijalankan oleh sebuah bank sentral yang memiliki kewenangan mencetak uang dan untuk mengambil langkah dalam skala lebih luas lagi.

Dalam hal ketidak seimbangan neraca pembayaran, Keynes merekomendasikan bahwa baik debitur maupun kreditur harus mengubah kebijakannya. Sebagaimana digambarkan Keynes, negara-negara dengan surplus pembayaran harus menambah impornya dari negara yang defisit sehingga dengan demikian menciptakan keseimbangan dalam perdagangan luar negeri. Dengan demikian, Keynes sensitif terhadap permasalahan bahwa menempatkan beban terlalu besar pada negara yang mengalami defisit akan deflasi.

Akan tetapi AS sebagai calon negara kreditur, yang bernafsu untuk mengambil peran sebagai lokomotif perekonomian dunia, mengabaikan rencana Keynes tersebut. Delegasi AS terlalu mencemaskan tekanan inflasi terhadap perekonomian dunia pasca perang, dan White melihat ketidak seimbangan hanya sebagai permasalahan negara-negara yang defisit.

Sekalipun dicapai kompromi atas beberapa poin, namun mengingat adanya kekuatan ekonomi dan militer AS, maka para peserta sebagian besar menyetujui rencana White. Apa yang muncul kemudian adalah sesuai dengan rencana AS. IMF menyiapkan dana(fund) yang merupakan kontribusi anggota dalam bentuk emas atau mata uang mereka. Ketika bergabung dengan IMF, anggota diberi kuota yang

merefleksikan kekuatan ekonomi mereka masing-masing, sebagai semacam credit deposit, wajib membayar iuran (subscription) dalam jumlah sesuai kuotanya.

#### 4.1.1 Tujuan International Monetary Fund (IMF)

Sekalipun telah berubah, dengan berlalunya waktu, namun tujuan statute IMF masih sama seperti ketika didirikan pada tahun 1944 yakni sebagaimana tercantum dalam Article 1 berikut ini.<sup>29</sup>

1. Untuk membina kerja sama moneter internasional melalui sebuah lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerja sama dalam mengatasi persoalan-persoalan moneter internasional.
2. Memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan seimbang dari perdagangan internasional, dan dengan demikian memberikan sum-bangan pada pertumbuhan dan pemeliharaan tingkat ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan nyata yang tinggi dan pengembangan sumber-sumber daya produktif seluruh anggota sebagai tujuan utama dari kebijakan ekonomi.
3. Meningkatkan stabilitas nilai tukar dan mempertahankan pengaturan nilai tukar yang tertib di antara para anggota, dan menghindari depresiasi nilai tukar yang kompetitif (competitive exchange depreciation).
4. Membantu mendirikan sistem pembayaran multilateral dalam kaitannya dengan transaksi kini di antara para anggota serta menghilangkan pembatasan valuta asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.
5. Memberikan kepercayaan kepada anggota dengan cara memungkinkan sumber dana IMF untuk diperoleh anggota dengan pengamanan yang memadai, dengan demikian memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperbaiki kesalahan penataan (maladjustment) dalam neraca

---

<sup>29</sup> Redaksi OCBC NISP, 'Apa Itu IMF? Pengertian, Sejarah, Tujuan Dan Tugasnya', *OCBC NISP*, 2022, p. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/02/02/imf>  
<<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/02/02/imf-adalah#:~:text=Copy Link-,Apa itu IMF%3F Pengertian%2C Sejarah%2C Tujuan dan Tugasnya,di tengah sistem moneter internasional seluruh dunia. Sistem tersebut diantaranya pembayaran,-dan juga nilai>> [accessed 2 February 2022].

pembayaran mereka tanpa menggunakan tindakan-tindakan yang destruktif bagi kemakmuran nasional maupun internasional.

6. Sejalan dengan usaha-usaha tersebut, mengurangi jangka waktu serta mengurangi tingkat ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional para anggota.

#### **4.1.2 Fungsi International Monetary Fund (IMF)**

IMF berkiprah untuk pertumbuhan global dan stabilitas ekonomi. Badan ini memberikan nasihat kebijakan serta pembiayaan kepada anggota yang mengalami kesulitan ekonomi, juga bekerja dengan negara-negara berkembang untuk membantunya mencapai stabilitas makroekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dasar pemikirannya adalah bahwa pasar kapital privat internasional tidak berfungsi sempurna dan banyak negara yang tidak memiliki cukup akses ke pasar finansial. Ketidaktersempurnaan pasar ini, bersama dengan pembiayaan neraca pembayaran, memberikan justifikasi pada pembiayaan resmi (*official financing*), yang tanpa dilakukannya tindakan ini maka banyak negara akan melakukan koreksi atas ketidakseimbangan pembayaran luar negerinya dengan cara-cara yang menghambat kemakmuran perekonomiannya baik secara nasional maupun internasional. IMF dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan lainnya bagi negara-negara yang membutuhkan, yang tidak dapat diperoleh kecuali jika memiliki program-program stabilisasi ekonomi yang didukung IMF.<sup>30</sup>

Saat didirikan, IMF dibebani dua fungsi utama: mengawasi nilai tukar tetap mata uang (*fixed exchange rate*) di antara negara-negara, dengan demikian membantu pemerintah nasional menjaga nilai tukar mata uangnya dengan memungkinkan pemerintah-pemerintah ini memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan kapital jangka pendek untuk membantu neraca pembayaran. Bantuan ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya krisis ekonomi.

---

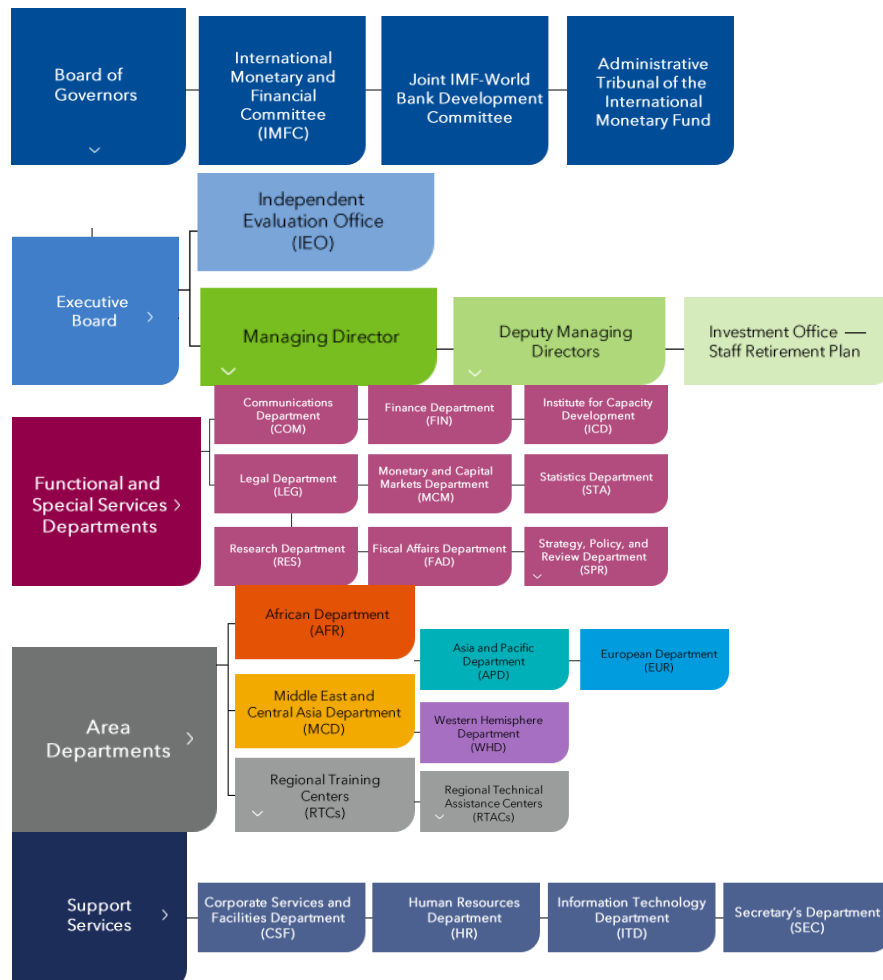
<sup>30</sup> HATA.

IMF juga bertujuan membantu merapikan perekonomian internasional yang porak poranda pasca depresi ekonomi (great depression) dan PD II.

Peranan IMF telah berubah secara fundamental sejak diberlakukannya nilai tukar mengambang (floating exchange rate) setelah tahun 1971. Lembaga ini fokus pada pemeriksaan kebijakan ekonomi negara-negara anggota dengan perjanjian pinjaman yang dibuat IMF untuk menentukan apakah kekurangan kapital disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau kebijakan ekonomi. IMF juga meneliti tipe-tipe kebijakan pemerintah seperti apa yang akan menjamin kebangkitan kembali perekonomian. Tantangan yang baru adalah cara meningkatkan dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengurangi frekuensi krisis di antara negara-negara yang pasarnya sedang tumbuh, terutama negara berpenghasilan menengah yang terbuka bagi arus kapital besar-besaran. Dari posisinya sebagai pengawas nilai tukar, fungsi IMF beralih menjadi pengawas performance makroekonomi.

### 4.1.3 Struktur Kepengurusan International Monetary Fund (IMF)

Bagan 4. 1 Struktur kepengurusan IMF



Sumber: <http://www.imf.org> <sup>31</sup>

Dalam struktur organisasi IMF terdapat beberapa jabatan utama yang memegang peran sangat penting baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh oleh IMF sebagai suatu lembaga moneter internasional, yaitu:<sup>32</sup>

<sup>31</sup> IMF, 'International Monetary Fund Organization Chart', *IMF*, 2021, p. <https://www.imf.org/en/About/Organization-Chart>

<[https://www.imf.org/external/about/orgchart/images/Area\\_TopRowAltB.png](https://www.imf.org/external/about/orgchart/images/Area_TopRowAltB.png)>.

<sup>32</sup> SRI ENDAH SUSILO RINI, 'FUNGSI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL MONETORY FUND', in *IMF DAN STABILITAS KEUANGAN INTERNASIONAL*, ed. by Shinta Sudrajat Syamsul Arifin, Wibisono, Charles P.R Joseph, 1st edn (Jakarta, 2007), p. 72.

#### **a. Dewan Gubernur (Board of Governors)**

Dewan Gubernur merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi IM, yang terdiri dari Governor (Gubernur IMF) dan Alternate Governor of the Fund (Gubernur Pengganti IMF) yang mewakili 190 negara anggota IMF. Governor dan Alternate Governor biasanya merupakan gubernur bank sentral atau menteri keuangan dari masing-masing negara anggota.

Dewan Gubernur menyelenggarakan pertemuan sekali dalam setahun pada pertemuan tahunan (annual meeting) IMF dan WB. Dalam pertemuan tersebut akan ditentukan dan dibahas isu-isu yang terkait dengan kebijakan utama IMF, sedangkan untuk pengambilan keputusan sehari-hari Dewan Gubernur telah mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Eksekutif. Untuk membahas isu-isu mengenai kebijakan yang terkait dengan system moneter internasional, dilakukan pertemuan dua kali dalam setahun dalam komisi Dewan Gubernur yang disebut IMFC.<sup>33</sup>

#### **b. Dewan Eksekutif (Executive Board)**

Dalam pelaksanaan kegiatan IMF sehari-hari, Dewan Gubernur telah mendelegasikan pengambilan keputusan kepada Dewan Eksekutif yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang mewakili 190 negara anggota IMF. Dari 24 Direktur Eksekutif tersebut, delapan di antaranya (yaitu lima untuk negara pemegang saham terbesar IMF dan tiga untuk negara besar lainnya) duduk dalam Dewan Eksekutif untuk mewakili negaranya masing-masing, yaitu AS, Jepang, Jerman, Perancis dan Inggris, serta Cina, Uni Soviet dan Arab Saudi. Sedangkan enam belas Direktur Eksekutif lainnya mewakili suatu kelompok negara (konstituensi) yang dipilih untuk periode dua tahun.<sup>34</sup>

Indonesia berada dalam kelompok South East Asia Voting Group (SEAVG) bersama 11 negara lainnya, yaitu: Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Nepal, Fiji dan Tonga. Sedangkan Filipina menggabungkan suaranya dengan Australia, dan Timor Leste

---

<sup>33</sup> RINI. Hal. 70

<sup>34</sup> RINI. Hal 71

menggabungkan suaranya dengan Italia dan Portugal. Dalam SEAVG tersebut selanjutnya dipilih satu orang Direktur Eksekutif (Executive Director) yang ditetapkan secara bergilir di antara keduabelas negara SEAVG. Adapun tugas Direktur Eksekutif adalah untuk menyuarakan kepentingan negara-negara yang termasuk dalam konstituen di IMF. Direktur Eksekutif tersebut dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Direktur Eksekutif Pengganti (Alternate Executive Director), Senior Advisors, Advisors dan beberapa staf administrasi lainnya.

Pelaksanaan pertemuan rutin Dewan Eksekutif biasanya dilakukan tiga kali dalam seminggu di Washington D.C, yaitu setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, atau lebih apabila terdapat isu-isu yang dipandang sangat perlu untuk dibicarakan lebih intensif.

### **c. Direktur Pengelola (Managing Director)**

Dewan Eksekutif selanjutnya akan memilih Direktur Pengelola (Managing Director) yang bertugas selain sebagai ketua Dewan Eksekutif, adalah juga sebagai kepala staff IMF dan bertugas menjalankan seluruh kegiatan IMF di bawah arahan Dewan Eksekutif. Masa jabatan Managing Director adalah lima tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.<sup>35</sup>

Managing Director dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tiga orang, yaitu satu orang First Deputy Managing Director dan dua orang sebagai Second Deputy Managing Director. Keempat orang inilah yang sering disebut sebagai "The Management" dari IMF.

The Management membawahi berbagai departemen yang dikelompokkan dalam empat kelompok besar, yaitu:<sup>36</sup>

1. Area Department-departemen yang berfungsi untuk menangani negara anggota secara langsung; Indonesia dan negara-negara di Asia, Australia dan Selandia Baru masuk dalam kelompok Asia and Pacific Department;
2. Functional and Special Services Departments;

---

<sup>35</sup> RINI. Hal. 71

<sup>36</sup> RINI. Hal 72



3. Information and Liaison; dan
4. Support Service. Dari keseluruhan departemen di IMF tersebut, yang sering terkait dengan Indonesia di antaranya adalah Policy Development and Review (PDR) Department, Monetary and Capital Market Department, dan Fiscal Affairs Department (FAD).

Secara keseluruhan IMF mempunyai ±2.715 orang staf di bawah pimpinan seorang Managing Director. Staf internasional tersebut berasal dari 165 negara yang sebagian besar adalah ekonom, dan staf lainnya berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti statistik, peneliti, bidang keuangan dan pajak, sistem keuangan dan bank sentral, ahli bahasa, penulis, editor dan staf pendukung lainnya. Sebagian besar staf tersebut ditempatkan di kantor pusat IMF di Washington, D.C., dan beberapa di antaranya ditempatkan di sekitar 80 kantor perwakilan IMF yang ditempatkan di negara-negara anggota untuk memberikan bantuan teknis di masing-masing negara tersebut. Selain itu IMF juga mempunyai kantor penghubung di Paris dan Tokyo yang berfungsi untuk mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga regional dan lembaga internasional lainnya serta dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sementara itu, kantor IMF yang berada di New York dan Geneva berfungsi sebagai penghubung antara IMF dengan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

#### **4.2 Posisi Indonesia Dalam Kelembagaan International Monetary Fund (IMF)**

Keanggotaan Indonesia di IMF yang sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 1954 (kemudian keluar tahun 1965 dan kembali lagi menjadi anggota tahun 1967), menjadikan peran IMF di dalam menjaga stabilitas keuangan internasional penting di mata Indonesia. Hal ini dapat dimengerti mengingat IMF merupakan satu-satunya Lembaga keuangan internasional yang diberikan mandat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Di samping itu, keanggotaannya yang terus bertambah dewasa ini hingga menjadi 190 negara menunjukkan bahwa eksistensi IMF menjadi sangat signifikan

bagi hampir seluruh negara di dunia. Jumlah negara anggota IMF yang universal tersebut menjadikan Lembaga tersebut memiliki data dan informasi terkini yang komprehensif serta riset-riset yang berkualitas. Hal ini sangat bermanfaat bagi negara anggota karena akses kepada data dan informasi global dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Indonesia mengharapkan ke depan IMF dapat menjadi penyedia informasi yang dapat diandalkan (*trusted advisor*) bagi negara anggota secara umum dan Indonesia secara khusus. Data dan informasi yang disediakan oleh IMF diharapkan dapat membantu pemerintah negara anggota dalam merumuskan kebijakan secara efektif dan membantu swasta dalam mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan mengurangi risiko.

Lebih jauh, Indonesia juga mengharapkan IMF untuk berperan sebagai partner bagi negara anggota. Untuk itu IMF hendaknya bekerjasama secara lebih terbuka dengan negara anggota. Dengan keterbukaan ini, seperti dalam hal saling berbagi informasi terkait dengan hasil peninjauan yang dilakukan di lapangan, tentunya akan tercapai hasil yang lebih efektif dalam membantu negara anggota mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Disamping itu, IMF juga diharapkan dapat memberikan bantuan teknis dengan bekerjasama secara lebih intensif dengan negara anggota, sehingga tidak hanya memberikan rekomendasi atas dasar pemantauan singkat saja. Negara anggota juga akan mendapatkan manfaat optimal dengan bantuan keuangan yang diberikan tepat pada saat dibutuhkan disertai dengan *conditionality* yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas negara peminjam.

Hak suara di IMF didasarkan pada sistem kuota. Setiap anggota memiliki sejumlah suara pokok (*basic votes*). Suara pokok yang dimiliki setiap anggota besarnya sama dengan 5,502% dari total suara yang dimiliki, ditambah satu suara tambahan untuk setiap 100.000 *Special Drawing Right (SDR)* yang menjadi kuotanya anggota. *SDR* bukan mata uang atau pun hutangnya IMF, melainkan satu unit

of accountnya IMF, suatu klaim terhadap mata uang internasional yang ditetapkan IMF yakni US dollar, Euro, Yen Jepang, dan Poundsterling.<sup>37</sup>

Sistem kuota IMF dimaksudkan untuk menyediakan dana bagi pinjaman. Setiap negara anggota IMF diberi kuota, atau kontribusi, yang mencerminkan ukuran relatif negara tersebut dalam perekonomian global. Kuota setiap negara anggota juga menentukan hak suaranya. Oleh karena itu, kontribusi finansial sebuah negara terkait dengan kewenangannya untuk memberikan suara dalam organisasi. Sistem ini analog dengan pemegang saham dalam sebuah perusahaan sehingga negara kaya memiliki suara lebih besar dalam membuat atau merevisi suatu aturan. Dikarenakan pengambilan keputusan dalam IMF relatif mencerminkan kedudukan ekonomi setiap anggota di dunia, negara-negara yang lebih kaya yang memasukkan uang lebih banyak akan memiliki pengaruh lebih besar dalam IMF dibandingkan dengan yang kurang kontribusinya. Walaupun demikian, IMF fokus pada persoalan redistribusi.

---

<sup>37</sup> Shinta Soekarno, 'Posisi Indonesia Dalam IMF', in *IMF DAN STABILITAS KEUANGAN INTERNASIONAL, Tinjauan Dan Kritis*, ed. by Sjamsul Arifin (Jakarta, 2004), p. 230 <<https://doi.org/EMK237070468>>.

Tabel 4. 1 kuota dan hak suara anggota Indonesia di IMF

Peringkat	Negara anggota	Kuota: juta SDR	Kuota: persentase total	Gubernur	Alternatif	Jumlah suara	Perse ntase suara total
1	 <a href="#">Amerika Serikat</a>	82,994.2	17.68	<a href="#">Steven Mnuchin</a>	<a href="#">Jerome Powell</a>	831,396	16.73
2	 <a href="#">Jepang</a>	30,820.5	6.56	<a href="#">Taro Aso</a>	<a href="#">Haruhiko Kuroda</a>	309,659	6.23
3	 <a href="#">Tiongkok</a>	30,482.9	6.49	<a href="#">Zhou Xiaochuan</a>	<a href="#">Gang Yi</a>	306,283	6.16
4	 <a href="#">Jerman</a>	26,634.4	5.67	<a href="#">Jens Weidmann</a>	<a href="#">Olaf Scholz</a>	267,798	5.39
5	 <a href="#">Prancis</a>	20,155.1	4.29	<a href="#">Bruno Le Maire</a>	<a href="#">François Villeroy de Galhau</a>	203,005	4.09
6	 <a href="#">Britania Raya</a>	20,155.1	4.29	<a href="#">Philip Hammond</a>	<a href="#">Mark Carney</a>	203,005	4.09
7	 <a href="#">Italia</a>	15,070.0	3.21	<a href="#">Giovanni Tria</a>	<a href="#">Ignazio Visco</a>	152,154	3.06
8	 <a href="#">India</a>	13,114.4	2.79	<a href="#">Rakesh Mohan</a>	<a href="#">Urjit Patel</a>	132,598	2.67
9	 <a href="#">Rusia</a>	12,903.7	2.75	<a href="#">Anton Siluanov</a>	<a href="#">Elvira S. Nabiullina</a>	130,491	2.63
10	 <a href="#">Brasil</a>	11,042.0	2.35	<a href="#">Henrique Meirelles</a>	<a href="#">Ilan Goldfajn</a>	111,874	2.25
11	 <a href="#">Kanada</a>	11,023.9	2.35	<a href="#">Bill Morneau</a>	<a href="#">Stephen Poloz</a>	111,693	2.25
12	 <a href="#">Arab Saudi</a>	9,992.6	2.13	<a href="#">Ibrahim A. Al-Assaf</a>	<a href="#">Fahad Almubarak</a>	101,380	2.04
13	 <a href="#">Spanyol</a>	9,535.5	2.03	<a href="#">Luis de Guindos</a>	<a href="#">Luis María Linde</a>	96,809	1.95
14	 <a href="#">Meksiko</a>	8,912.7	1.90	<a href="#">Luis Videgaray</a>	<a href="#">Agustín Carstens</a>	90,581	1.82
15	 <a href="#">Belanda</a>	8,736.5	1.86	<a href="#">Klaas Knot</a>	<a href="#">Hans Vijlbrief</a>	88,819	1.79
16	 <a href="#">Korea Selatan</a>	8,582.7	1.83	<a href="#">Kim Dong-yeon</a>	<a href="#">Lee Ju-yeol</a>	87,281	1.76
17	 <a href="#">Australia</a>	6,572.4	1.40	<a href="#">Scott Morrison</a>	<a href="#">John Fraser</a>	67,178	1.35
18	 <a href="#">Belgia</a>	6,410.7	1.37	<a href="#">Jan Smets</a>	<a href="#">Marc Monbaliu</a>	65,561	1.32
19	 <a href="#">Swiss</a>	5,771.1	1.23	<a href="#">Thomas Jordan</a>	<a href="#">Eveline Widmer-Schlumpf</a>	59,165	1.19
20	 <a href="#">Indonesia</a>	4,648.4	0.99	<a href="#">Agus D.W. Martowardojo</a>	<a href="#">Mahendra Siregar</a>	47,938	0.96

38

Sementara itu, bagi Indonesia meski disadari bahwa share kuota SEAVG di IMF relatif kecil yaitu hanya 3,034%, namun dengan share Indonesia di konstituen saat ini yang paling besar(0,956%) menjadikan Indonesia mempunyai peluang lebih besar mengartikulasikan kepentingan Indonesia di IMF. Ditambah lagi, dengan semakin besarnya tekanan IMF untuk mereformasi dirinya termasuk upaya untuk meningkatkan suara negara berkembang, maka ke depan terdapat peluang bagi

<sup>38</sup> WIKIPEDIA, 'Dana Moneter Internasional', WIKI MEDIA INDONESIA, 2023  
<[https://id.wikipedia.org/wiki/Dana\\_Moneter\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Moneter_Internasional)> [accessed 18 January 2023].

Indonesia untuk dapat lebih mengartikulasikan kepentingan bersama (common interests) negara berkembang di IMF. Hal ini penting mengingat kebijakan yang telah diadopsi oleh IMF harus senantiasa ditaati oleh seluruh negara anggota.<sup>39</sup>

#### **4.2.1 Hubungan Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF)**

Indonesia pertama kali menjadi anggota IMF pada tanggal 15 April 1954, dan pada bulan Mei tahun 1965 Indonesia keluar dari IMF. Kemudian Indonesia kembali menjadi anggota IMF pada tanggal 23 Februari 1967. Sebagai salah satu anggota IMF, Indonesia telah melaksanakan pembayaran kuota sebesar SDR 2.079,3 juta. Kuota Indonesia ini telah mengalami peningkatan sebanyak tujuh kali, yaitu SDR 260.000 (1973), SDR220.000(1978), SDR 240.000(1980), SDR 289.000(1983), SDR 487.900(1992), dan SDR 581.700(1999). Dengan jumlah tersebut Indonesia memperoleh Hak Suara (Vote) sebesar 21.043 atau sekitar 0,97% dari total keseluruhan hak suara anggota IMF.<sup>40</sup>

Dalam keanggotaannya, Pemerintah Indonesia telah menunjuk Gubernur Bank Indonesia sebagai Governor of the Fund (Gubernur IMF) untuk Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai Alternate Governor of the Fund (Gubernur Pengganti IMF) untuk Indonesia. Selama menjadi anggota IMF, Indonesia pernah memperoleh beberapa fasilitas pinjaman yang diberikan, yaitu The Four Credit Tranche, Compensatory Financing Facility, Buffer Stock Facility, Standby Arrangement, dan Extended Fund Facility.

Fasilitas pinjaman IMF yang pertama kali dimanfaatkan oleh Indonesia adalah The Four Credit Tranche yang disetujui oleh IMF pada tanggal 19 Februari 1968. Penarikan Credit Tranche yang pertama dapat dilaksanakan segera setelah permohonan disetujui oleh IMF, yaitu sebesar USD 51,75 juta dengan jangka waktu pinjaman selama satu tahun. Namun Credit Tranche yang kedua sampai dengan yang keempat selalu dilaksanakan atas dasar "Stand-by Arrangement"(SBA). Pinjaman tersebut terus berlanjut hingga SBA keempat sebesar USD 50 juta yang

---

<sup>39</sup> Soekarno. Hal. 233

<sup>40</sup> Azhari Firmansyah, 'Hubungan Indonesia Dengan IMF', in *IMF Dan Stabilitas Keuangan Internasional*, ed. by Wibosono (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2004).

disetujui pada tanggal 14 April 1971. Dengan demikian pada tahun tersebut total pinjaman yang sudah ditarik Indonesia mencapai USD 148,8 juta. Fasilitas tersebut diterima Indonesia dalam rangka mengatasi krisis sebagai akibat kebangkrutan pemerintah di awal pemerintahan Orde Baru.<sup>41</sup>

Selanjutnya pada tanggal Januari 1983, Indonesia memanfaatkan fasilitas Buffer Stock Financing Facility (BFF) untuk bufferstock timah dan karet membayar iuran dalam rangka menstabilkan komoditas tersebut untuk membantu negara-negara anggota dalam rangka pasar dunia. Pada dasarnya fasilitas ini harga-harga diberikan membayar iuran buffer stock kepada organisasi komoditas dunia yang telah diakui oleh IMF. Fasilitas yang diterima Indonesia sebesar SDR27,7juta untuk iuran buffer stock timah dalam rangka International Tin Organization (To) keempat, dan SDR 37,4 juta untuk iuran bufferstock karet dalam rangka International Natural Rubber Organization (INRO). Sejak tanggal 23 Juli1984 s.d. 29 November 1985 Indonesia telah melunasi dana bufferstock melalui empat kali pembayaran masing-masing sebesar SDR 65,1 juta. Dengan demikian fasilitas BFF tersebut secara keseluruhan telah dilunasi. Saat ini fasilitas BFF telah dihapuskan.

Fasilitas lainnya yang pernah pula dimanfaatkan Indonesia adalah Compensatory Financing Facility (CFF). Fasilitas ini diberikan kepada negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran (yang bersifat sementara) sebagai akibat berkurangnya penerimaan ekspor karena faktor-faktor di luar kekuasaan negara yang bersangkutan. Menurunnya penerimaan ekspor yang dialami Indonesia menjadikan pada tanggal 3 Agustus 1983 Indonesia memperoleh fasilitas CFF sebesar SDR 360 juta, yaitu 50% dari kuota pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 12 Mei 1987, Indonesia memanfaatkan kembali fasilitas CFF sebesar SDR 462,9 juta karena menurunnya ekspor Indonesia sebagai pengaruh turunnya harga-harga komoditas primer dalam tahun 1986. Atas fasilitas tersebut telah dilakukan pembayaran keseluruhan.

Krisis keuangan yang terjadi di tahun 1997 menjadikan Indonesia menerima kembali fasilitas pinjaman dari IMF pada bulan November1997 dalam bentuk SBA

---

<sup>41</sup> Irfa Ampri, 'Arsitektur Keuangan Internasional: Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global', *Kementerian Keuangan*, 2020, 1–13.

sebesar SDR 2.201.472.000,00. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi SDR 3.669.120.000,00 atau 176,46% dari kuota Indonesia. Fasilitas tersebut selanjutnya diubah menjadi Extended Fund Facility (EFF) karena permasalahan neraca pembayaran Indonesia dipandang bukan temporer melainkan fundamental. Fasilitas EFF yang diterima oleh Indonesia keseluruhannya berjumlah SDR 7.435.700.000,00 atau 357,61% dari kuota Indonesia. Dengan demikian, total komitmen yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia untuk kedua fasilitas tersebut sebesar SDR 11.104.820.000,00 atau 534,07% dari kuota Indonesia. Indonesia telah mempercepat pelunasan seluruh pinjamannya kepada IMF melalui dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 30 Juni 2006 dan 12 Oktober 2006.<sup>42</sup>

#### **4.2.2 Sumber Pendanaan International Monetary Fund (IMF) berupa SDR**

Sebagian besar sumber dana IMF didapat dari negara anggota, terutama melalui pembayaran kuota. Selanjutnya IMF membuat perjanjian dengan sejumlah negara anggotanya untuk meminjam uang sebagai tambahan dananya (yang akan dipinjamkan lagi ke negara yang membutuhkan). Di samping kedua sumber dana tersebut IMF juga mendapat pemasukan dari penjualan cadangan emasnya.

Cadangan emas IMF berjumlah 90,5 juta troyons (2.814,1 metrikton), menjadikan IMF sebagai pemegang ketiga terbesar dari emas dunia. Namun IMF Articles sangat membatasi penggunaan emas ini. Jika disetujui oleh 85% dari negara pemilik suara, IMF dapat menjual emasnya atau dapat menerima emas sebagai pembayaran dari anggota namun dilarang membeli atau melakukan transaksi emas lainnya.<sup>43</sup>

Pada bulan Desember 2010, IMF meluncurkan program penjualan emas secara terbatas, mencakup sekitar seperdelapan dari total emas yang dikuasainya, setelah disepakati Badan Eksekutif pada bulan September 2009. Penjualan sejumlah 222 ton dilakukan kepada pemegang emas resmi, termasuk Reserve Bank of India

---

<sup>42</sup> Harmen.

<sup>43</sup> Dr. Hata, 'Sumber Pendanaan IMF', in *Hukum Ekonomi Internasional*, ed. by Nur Saadah (Malang, Jawa Timur: Setara Press, 2016), pp. 23–25.

(200 ton), The Bank of Mauritius (2 ton), The Central Bank of Sri Lanka (10 ton), dan The Bangladesh Bank (10 ton). Program penjualan emas ini dilakukan dengan pengamanan ketat untuk menghindari gejolak pasar, dan semua penjualan ini berdasarkan harga pasar, termasuk penjualan langsung kepada pemegang resmi.<sup>44</sup>

Keuntungan dari penjualan adalah untuk menyehatkan keuangan lembaga tersebut. Badan Eksekutif juga menyetujui bahwa sumber dana sekitar 0.5-0,6 milyar SDR yang terkait penjualan emas ini akan digunakan untuk mensubsidi negara-negara berpenghasilan rendah dan meningkatkan dana pinjaman konsesional. Pada bulan Februari 2012, Badan Eksekutif setuju untuk membagikan keuntungan yang diraih dari penjualan emas senilai SDR 700 juta kepada seluruh anggota. Pembagian dilakukan secara proporsional sesuai dengan kuota tiap anggota. Pembagian ini baru efektif apabila negara-negara anggota telah memberikan jaminan bahwa 90% dari dana ini (SDR 630 juta) akan digunakan untuk bantuan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan.

#### **4.2.2.1 Special Drawing Rights (SDR)**

Pada mulanya SDR (Hak Tarik Khusus) yang dibentuk oleh IMF pada tahun 1969 tersebut ditujukan untuk mendukung sistem nilai tukar tetap Bretton Woods (Bretton Woods fixed exchange rate system). Negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem ini membutuhkan cadangan devisa resmi dalam bentuk emas atau mata uang asing kuat lainnya. Cadangan devisa resmi tersebut akan digunakan untuk menukar mata uang local negara tersebut dalam pasar valas, yang selanjutnya akan digunakan untuk memelihara nilai tukar negara tersebut. Namun demikian, sistem ini hanya dapat berjalan selama beberapa tahun saja, untuk kemudian digantikan dengan sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate).<sup>45</sup>

Adapun SDR tersebut merupakan reserve asset internasional untuk mendukung cadangan devisa resmi masing-masing negara anggota yang telah ada. SDR dialokasikan kepada negara-negara anggota berdasarkan proporsi kuota

---

<sup>44</sup> Dr. Hata.

<sup>45</sup> Riasto Widitomo, 'SDR Sebagai Aset Cadangan Resmi', in *IMF Dan Krisis Asia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), pp. 2-4.



negara tersebut di IMF dan digunakan sebagai dasar penghitungan baik bagi IMF maupun beberapa organisasi internasional lainnya. Nilai SDR didasarkan pada nilai sekeranjang mata uang kuat internasional (basket of key international currencies). Saat ini, klaim oleh IMF tidak lagi menggunakan SDR, namun dalam bentuk freely usable currencies dari masing-masing negara anggota. Negara anggota pemegang SDR dapat menukar SDR tersebut dalam dua cara, yaitu melalui:

1. Arrangement nilai tukar secara sukarela di antara masing-masing negara anggota, dan
2. Sistem yang dibuat oleh IMF bagi negara anggota yang mempunyai posisi eksternal yang kuat untuk membeli SDR dari negara yang memiliki posisi eksternal lemah.

SDR interest rate digunakan sebagai dasar untuk menghitung:

- Besarnya suku bunga pinjaman IMF yang bersifat non-concessional loans;
- Suku bunga terkait dengan SDR holdings; dan
- Jumlah yang harus dibayarkan oleh negara anggota terkait dengan porsi quota subscription.

Berdasarkan Articles of Agreement, IMF dapat mengalokasikan SDR kepada negara-negara anggotanya berdasarkan porsi besarnya kuota masing-masing negara tersebut. Secara umum terdapat dua macam pengalokasian, yaitu:

#### 1. General allocation of SDR

Ditetapkan setiap lima tahun sekali, meskipun sampai dengan tahun 2006 keputusan untuk pengalokasian hanya dilakukan sebanyak dua kali. Pengalokasian yang pertama sebesar SDR 9,3 miliar di distribusikan pada tahun 1970-72 dan pengalokasian SDR yang kedua di distribusikan pada tahun 1979-81 dengan total keseluruhan sebesar SDR 21,4 miliar.

#### 2. Special One-Time allocation of SDR

Disetujui oleh Dewan Gubernur IMF pada bulan September 1997 melalui amandemen keempat dari Articles of Agreements. Alokasi tersebut akan

mengakumulasi besarnya alokasi SDR menjadi dua kali lipat, yaitu sebesar SDR 42,8 miliar. Amandemen keempat akan efektif dilaksanakan ketika 3/5 anggota IMF (sekitar 111 negara) dengan 85% total voting menerima keputusan tersebut. Pada akhir bulan Agustus 2006, 131 negara anggota dengan 77,3% total voting power menerima proposal amandemen tersebut.

Nilai SDR pada saat itu dinilai ekuivalen dengan 0,888671 gram emas atau sama dengan nilai 1 USD. Setelah sistem Bretton Woods berakhir pada tahun 1973, nilai SDR ditetapkan secara harian dan dipublikasikan dalam website IMF. Nilai SDR tersebut dihitung berdasarkan nilai tukar empat mata uang utama yaitu: euro, JPY, poundsterling dan USD. Komposisi currency basket tersebut di review setiap lima tahun sekali untuk memastikan bahwa nilainya tersebut mewakili mata uang yang digunakan di dalam transaksi internasional, dan bahwa nilai yang ditetapkan untuk mata uang tersebut mencerminkan kepentingan relative masing-masing negara dalam perdagangan dan sistem keuangan dunia.

Pada tahun 2000, Dewan Eksekutif IMF menyetujui metode standar penghitungan SDR dengan mengadopsi metode penghitungan nilai SDR pada tahun 1974 serta menyetujui mata uang euro sebagai salah satu mata uang di dalam currency basket. Melalui metode tersebut, SDR ditetapkan berdasarkan empat mata uang yang (i) diterbitkan oleh negara anggota IMF yang mempunyai nilai ekspor barang dan jasa terbesar selama lebih dari lima tahun dan terbesar selama lebih dari lima tahun; dan (ii) ditetapkan oleh IMF sebagai freely usable currencies oleh IMF (sesuai Article XXX(f)).

Pada tanggal 23 November 2005, Dewan Eksekutif IMF menyetujui revisi komposisi empat mata uang yang mencerminkan nilai dari SDR, menjadi USD (44%), euro (34%), JPY (11%) dan poundsterling (11%). Penghitungan komposisi tersebut merupakan kombinasi dari nilai ekspor (selama rata-rata lima tahun) dan cadangan devisa resmi yang ditetapkan oleh otoritas moneter diluar negara atau otoritas moneter negara yang mengeluarkan mata uang tersebut.

Sedangkan untuk tingkat bunga SDR, Dewan Eksekutif IMF telah menyetujui untuk menggunakan market yield Treasury-Bill 3 bulan untuk USD dan poundsterling, dan suku bunga Government Financing Bill 3mingguan sebagai suku bunga bagi mata uang JPY ,dan menggunakan suku bunga Euribor 3 bulanan sebagai suku bunga bagi Euro. Dewan Eksekutif IMF berpendapat bahwa metodologi penghitungan SDR saat ini tidak merefleksikan peningkatan yang besar dalam arus keuangan internasional swasta.

#### **4.2.3 Eksistensi International Monetary Fund (IMF) untuk Indonesia**

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama lebih dari 90 tahun masa berdiri nya, peran IMF masih dirasakan dalam perekonomian global. Di sisi lain efektivitas peran IMF juga banyak mendapat kritikan, terutama efektivitas nya dalam menghadapi krisis atau ancaman krisis. Di samping itu situasi global juga ditandai dengan munculnya berbagai perkembangan yang dapat 'mengancam' eksistensi IMF, diantaranya munculnya regional financing arrangement dan lembaga keuangan regional serta meningkatnya dialog yang lebih intensif antar kawasan dalam berbagai fora. Dalam hal ini IMF dipandang masih dapat berperan dalam menjaga stabilitas keuangan internasional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. IMF masih merupakan satu-satunya lembaga multilateral yang memfokuskan diri untuk menjaga keseimbangan ekonomi makroglobal dan stabilitas keuangan internasional;
- b. Bantuan keuangan IMF masih diperlukan sebagai tindakan berjaga-jaga dalam rangka crisis prevention atau pun untuk mengatasi krisis yang mungkin terjadi. Lebih jauh, pemberian bantuan keuangan oleh sebagian lembaga keuangan internasional lainnya atau negara donor masih memerlukan persetujuan pinjaman IMF sebagai acuan dalam keputusan memberikan pinjaman kepada suatu negara (seal of approval);

---

<sup>46</sup> Iman Sudrajat, 'Eksistensi IMF', in *Posisi Indonesia Dalam IMF*, ed. by Charles Joseph (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), pp. 233–36.

- c. Dengan keanggotaannya yang hampir universal, IMF memiliki perspektif unik dalam perannya sebagai lembaga yang melaksanakan surveillance ekonomi dan keuangan global. Berbagai isu keuangan global saat ini masih memerlukan lembaga yang dapat menyatukan pandangan dan collective action negara-negara di dunia untuk mengatasinya, seperti isu global imbalances, aging population dan pengentasan kemiskinan; dan
- d. Bantuan teknis IMF yang diberikan kepada berbagai negara di dunia masih diperlukan, bahkan memiliki comparative advantage mengingat IMF memiliki pengalaman dalam mengatasi berbagai krisis ekonomi dan memiliki perspektif global yang baik.